

BLT Belanja Lebih Tenang
Berlaku 02 - 04 MEI 25

TAP TAP BELANJA MANTAP
Berlaku 01 - 07 MEI 2025

Produk yang ditampilkan: BANGKO BANGO, ROYAL MOZZA, 365 GULA PASIR KUNING, TROPICAL MINYAK GORENG, BEBEK, PEAR PAKAM, JERUK BABY SHANTANG DAUN, SUNNY GOLD CHICKEN, SUNNY GOLD CHICKEN TEMPURA, NUGGET, STICK PCK 500GR, NONG SHIM SHIN RAMYUN, KIN YOGURT, ELUPS HAIR VITAMIN, ZEN BODY WASH, GARNIER ANTI-BACTERIAL, SO KLIN ROYALE, EKONOMI CAIRAN PENCUCI, SWEETLY BABY DIAPERS SILVER.

Pemda DIY Serahkan 318 SK CPNS



KR-Riyana Ekawati

Sekda DIY menyerahkan SK CPNS kepada salah satu perwakilan.

YOGYA (KR) - Pemda DIY menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 318 orang untuk formasi tahun 2024. Penyerahan SK tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemda DIY terhadap penguatan birokrasi inklusif.

"Pesan utama yang ingin kami sampaikan kepada CPNS adalah pentingnya etos belajar, orientasi pelayanan yang humanis, serta solidaritas kerja dalam keberagaman," kata Sekda DIY, Beny Suharsono di Pendopo Wiyoto Projo, Kompleks Kepatihan Rabu (30/4).

Terkait kekosongan untuk 60 formasi CPNS di Pemda, Beny mengatakan, penyebabnya karena kegagalan peserta dalam memenuhi nilai ambang batas (passing grade) serta minimnya jumlah pelamar yang memenuhi syarat pada sejumlah formasi.

Pihaknya menyayangkan kondisi ini, karena formasi yang telah diumumkan secara resmi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Guna mengatasi hal ini, pihaknya akan kembali mengusulkan 60 formasi kosong tersebut dalam proses rekrutmen berikutnya.

Sementara itu Kepala Badan Peggawain Daerah (BKD) DIY, Hary Setiawan menambahkan, dalam seleksi CPNS tahun 2024 terdapat 60 formasi yang tidak terisi. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena formasi tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak awal rekrutmen. Adapun penyebab kekosongan tersebut cukup beragam. Mulai dari pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi, peserta yang tidak lolos passing grade, hingga pengunduran diri usai dinyatakan lulus.

"Formasi yang kosong tersebut tersebar di berbagai instansi, di antaranya dari jabatan pengelola barang dan auditor. Tidak sedikit kasus

pengunduran diri terjadi setelah proses tes dan pengumuman kelulusan, tepat saat tahapan pemberkasan berlangsung," jelasnya.

Menanggapi kekosongan ini, BKD DIY berencana melakukan evaluasi menyeluruh. Formasi yang belum terisi akan diusulkan kembali dalam rencana pengadaan CPNS tahun depan, dengan menunggu persetujuan pemerintah pusat. **(Ria)-f**

KAWASAN TANPA ROKOK DI MALIOBORO

Wisatawan Masih Dominasi Pelanggaran

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya sudah menetapkan tujuh kawasan tanpa rokok yang diatur melalui Perda 2/2017. Sejauh ini wisatawan masih mendominasi pelanggaran karena ketidaktahuannya atas kebijakan tersebut. Terutama di sepanjang Malioboro yang diatur lebih teknis melalui Kepwal 261/2020.

Tujuh kawasan tanpa rokok tersebut ialah fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Pada lokasi tersebut masyarakat tidak diperkenankan merokok sembarangan. "Lokasi lain implementasi kawasan tanpa rokok relatif terkendali. Tetapi di Malioboro yang menjadi salah satu tempat umum masih ditemui banyak kendala," ungkap Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, Kamis (1/5).

Oleh karena itu pelanggaran kawasan tanpa

rokok di Malioboro juga terbilang tinggi. Pada tahun 2023 tercatat ada 2.923 pelanggaran. Kemudian tahun 2024 naik hampir dua kali lipat yakni mencapai 4.158 pelanggaran. Sedangkan tahun ini hingga akhir April lalu mencapai 703 pelanggaran, didominasi oleh wisatawan 652 orang, dan sisanya 51 orang merupakan warga lokal.

Tingginya pelanggaran berupa merokok sembarangan di sepanjang Malioboro tidak lepas dari pengunjung yang silih berganti. Alasan utama para pelanggar tersebut lantaran tidak mengetahui adanya larangan

merokok tersebut. Meski sosialisasi terus dilakukan namun tetap dibutuhkan peran semua pihak. "Kami berharap, justru para pelaku jasa pariwisata di Malioboro seperti karyawan toko, tukang becak, kusir andong dan warga lokal yang beraktivitas di sana bisa turut berpartisipasi sebagai agen untuk ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok," urai Octo.

Kolaborasi yang terbangun dari semua pihak dipastikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya kawasan tanpa rokok. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha

sangat diperlukan untuk mewujudkan Yogya bebas asap rokok.

Sebelumnya, Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo mengaku jajarannya memiliki komitmen dalam mendukung setiap aksi kampanye kawasan tanpa rokok. Pekan lalu dirinya bahkan ikut terjun langsung dalam aksi kreatif dan edukatif yang dilakukan oleh anak-anak muda di kawasan Malioboro dalam mensosialisasikan kawasan tanpa rokok. "Karena kita ingin bebas dari asap rokok, dan kita tidak ingin tercemar rokok. Malioboro menjadi tempat yang sangat cocok untuk kampanye karena ini merupakan kawasan sumbu filosofi dan destinasi wisata seka-

ligus menjadi heritage dan tempat yang memang dilarang untuk merokok," jelasnya.

Dirinya mendukung kampanye kawasan tanpa rokok untuk pencegahan penyakit terutama gangguan paru-paru dan penyakit lainnya.

Menurutnya, merokok tidak hanya mengundang penyakit melainkan juga membuat gaya hidup boros. Dalam rata-rata per bulan, biaya yang dikeluarkan oleh perokok aktif untuk membeli rokok tidaklah sedikit. "Ingat rokok tidak hanya membuat kita menjadi sakit, tetapi rokok juga membuat boros. Oleh karenanya mari hidup berhemat dan hidup sehat," pesannya. **(Dhi)-f**

KEPALA DISKOMINFO CANANGKAN DESA CANTIK 2025 Sendangsari Bisa Jadi Contoh dan Panutan Kalurahan Lain



KR-Asrul Sani

Kepala Diskominfo Kulonprogo memukul gong menandai pencanangan Desa Cantik 2025 untuk Kalurahan Sendangsari.

KULONPROGO (KR) - Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo bisa menjadi contoh dan panutan bagi kalurahan lain, dalam hal desiminasi informasi yang didukung oleh keakuratan data yang disajikan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agung Kurniawan SIP MSi usai prosesi pemukulan gong dan penandatanganan piagam sebagai tanda pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2025 untuk Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Rabu (30/4).

Nampak hadir dalam pencanangan Desa Cantik 2025 Statis Ahli Madya di Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan DIY, Soman Wisnu.

Lebih lanjut Agung Kurniawan mengungkapkan, Kalurahan Sendangsari telah memperoleh banyak penghargaan, di antaranya Desa Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. Sehingga sangat pantas kalurahan tersebut menjadi contoh dan panutan bagi kalurahan lain terutama dari sektor desiminasi informasi.

Akurasi dan akuntabilitas data dapat mempengaruhi target perencanaan Pemerintah Kulonprogo, sehingga keakuratan data harus dimulai dari tingkat Kalurahan.

Sementara itu Statistisi Ahli Madya di BPS Perwakilan DIY, Soman Wisnu berharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan keteguhan agar semakin mampu menghasilkan data yang akurat, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan di tingkat kalurahan maupun kabupaten.

Adapun laporan penyelenggaraan kegiatan Program Desa Cantik Tahun 2024 di Kabupaten Kulonprogo yang disampaikan Kepala BPS Kulonprogo, Sumarwiyanto, melalui SK Lurah Sendangsari, Kalurahan Sendangsari telah membentuk Agen Statistik yang berjumlah lima orang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan pemahaman dan literasi data statistik kepada masyarakat di kalurahannya.

Selanjutnya dilakukan pengukuhan Agen Statistik oleh Lurah Sendangsari, Suhardi disaksikan oleh Perwakilan BPS DIY dan Kulonprogo, Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Diskominfo setempat, Panewu Pengasih, Drs Sunarya dan mitra kerja statistik.

Salah satu Agen Statistik, Sigit Rahmanto berharap dapat memanfaatkan data statistik untuk kemajuan kalurahan dan kesejahteraan masyarakat. **(Rul)-f**

Kulonprogo Raih Tiga Penghargaan di Top BUMD Awards 2025



KR-Asrul Sani

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan (tengah), Dirut Perumda Air Minum Tirta Binangun, Jumanoro dan Dirut PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulonprogo (Perseroda), Joko Purnomo (kanan) menunjukkan penghargaan yang mereka raih.

KULONPROGO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo meraih tiga penghargaan Top BUMD Awards 2025 yang diselenggarakan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) bersama Top Business didukung Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN. Penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Senin (28/4).

Penghargaan pertama diraih Agung Setyawan Bupati Kulonprogo sebagai Top Pembina BUMD, sementara penghargaan kedua diraih Jumanoro Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Binangun sebagai Perumda Tirta Binangun Golden Trophy & Top BUMD Award Bintang 5 serta penghargaan ketiga diraih Joko Purnomo Dirut PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagai Top BUMD Award Bintang 5.

Ditemui se usai acara, Bupati Agung Setyawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kulonprogo serta rasa syukurnya.

"Alhamdulillah dengan keterwakilan BUMD Bank Kulonprogo dan BUMD Perumda Tirta Binangun mendapatkan penghargaan sebagai Top BUMD. Ini adalah buah dari kerja keras dan kerja sama, kemenangan ini adalah perwujud-

dan bahwa Kulonprogo bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya dan insya Allah kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Kulonprogo," tegasnya.

Pihaknya berharap, penghargaan ini bisa menjadi inspirasi bagi BUMD lainnya serta para pelaku usaha, untuk selalu bertumbuh dan mengembangkan diri, menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin kompleks.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2025, M Lutfi Handayani menjelaskan, pemberian penghargaan didasarkan atas peran dan interaksi kepala daerah yang turut menentukan keberhasilan pengelolaan BUMD. Melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri dari berbagai unsur akademisi, praktisi serta konsultan bisnis.

"Top BUMD Awards diselenggarakan juga untuk mendukung program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah guna mempercepat peningkatan kinerja BUMD dalam pembangunan perekonomian di daerah," jelasnya.

Sehingga harapannya, Top BUMD Awards menjadi satu penanda prestasi serta rujukan perbaikan, terkait kinerja bisnis, layanan serta kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. **(Rul)-f**